

Sejarah Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda: Tinjauan Historis dalam Novel Indonesia

The History of Independence Recognition by Dutch: Historical Review in Indonesian Novels

Andri Wicaksono

STKIP PGRI Bandar Lampung, Indonesia

Penulis koresponden: ctx.andrie@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memaparkan secara mendalam peristiwa penyerahan kedaulatan Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Fakta-fakta dihimpun dari novel-novel yang bercirikan sejarah pada masa itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan teori *New Historicism*. Objek kajian adalah novel-novel Indonesia yang berlatar perang kemerdekaan, yaitu *Burung-burung Manyar* karya Y.B. Mangunwijaya, *Larasati* karya Pramoedya Ananta Toer, dan *Cantik Itu Luka* karya Eka Kurniawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa yang melingkupi penyerahan kedaulatan Indonesia adalah Agresi Militer II yang dipusatkan di Yogyakarta, perundingan yang diinisiasi oleh Dewan Keamanan PBB serta Konferensi Meja Bundar.

Kata kunci: *New Historicism*, penyerahan kedaulatan Indonesia, perang kemerdekaan

Abstract

This study aims to describe in depth the events of the surrender of Indonesian sovereignty during the war of independence. The facts are compiled from novels that are characterized by history at that time. The method used in this research is content analysis with *New Historicism* theory. The objects of study are Indonesian novels on the war of independence, including *Birds of Manyar* by Y.B. Mangunwijaya, *Larasati* by Pramoedya Ananta Toer, and *Beauty Is Wound* by Eka Kurniawan. The results showed that the events surrounding the transfer of Indonesian sovereignty included the Second Military Aggression which was centered in Yogyakarta, the negotiations initiated by the UN Security Council and the Round Table Conference.

Keywords: *New Historicism*, surrender of Indonesian sovereignty, war of independence

Riwayat Artikel: Diajukan: 1 November 2021; Disetujui: 16 Agustus 2022

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu genre sastra, novel memegang peranan penting dalam memberikan pandangan untuk menyikapi hidup secara artistik imajinatif. Hal itu memungkinkan karena persoalan yang dibicarakan dalam novel adalah persoalan manusia dan kemanusiaan. Perkembangan novel di Indonesia cukup pesat, terbukti dengan banyaknya novel baru yang diterbitkan. Novel-novel tersebut memiliki bermacam tema dan isi, antara lain tentang problem-problem sosial yang pada umumnya terjadi dalam masyarakat, termasuk yang berhubungan dengan perasaan dan kejiwaan. Hal itu menarik dibicarakan karena jiwa adalah hakikat kehidupan makhluk yang bernyawa. Terkait dengan itu, novel memuat kehidupan

manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Novel berfungsi mempelajari kehidupan manusia pada zaman tertentu.

Berdasarkan pembacaan awal terhadap sejumlah novel Indonesia modern, ditemukan sejumlah novel yang menggambarkan peristiwa sejarah perjuangan bangsa pada masa perang kemerdekaan (1945–1949) yang pernah terjadi di Indonesia. Kesejajaran tersebut menyangkut periode sejarah, kondisi sosial dan politik yang mengakibatkan timbulnya konflik, kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam konflik serta konflik dan perubahan sosial-politik. Kurun waktu sejarah yang relevan dengan permasalahan ini adalah pada masa revolusi nasional guna mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih. Untuk lebih spesifik lagi, dalam penelitian ini dibatasi pada sejarah perjuangan dalam novel-novel Indonesia berlatar perang kemerdekaan. Pemilihan latar di sini ditentukan guna mempermudah pendataan sastra sejarah yang ada; sastra sebagai dokumen sejarah.

Ketika karya sastra dapat dijadikan sebagai rujukan sejarah, sastra telah membuktikan dirinya sebagai ilmu yang bukan hanya bicara persoalan kreativitas dan rentetan imajinasi, tetapi dapat pula berfungsi sebagai dokumen sejarah (Wellek & Warren, 2016). Dari sini, ilmu sastra akhirnya dapat menembus kungkungan kodratnya sebagai ilmu yang mengikat. Dilihat dari sudut sastra, karya sastra sejarah termasuk salah satu jenis sastra (Khakim, 2016).

Di antara berbagai sarana representasi seperti buku teks sejarah, monumen, museum, dan media umumnya didominasi dan menyuarakan kepentingan penguasa (negara), sastra memiliki sikap dan pandangan yang tidak selalu sejalan dengan kemauan tersebut (Wicaksono, 2018a). Studi tentang perang kemerdekaan yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pada masa revolusi itu, sastra Indonesia, khususnya novel, terlibat dalam persoalan berbagai representasi mengenai perang kemerdekaan (Wicaksono, 2018b). Untuk itu, kajian ini secara mendalam untuk menjembatani temuan sejarah yang terdapat dalam teks sastra.

Pemilihan objek latar sejarah dan representasinya dalam novel difokuskan pada peristiwa yang melatarbelakangi penyerahan kedaulatan Indonesia dari tangan Belanda pada 27 Desember 1949. Peristiwa yang lebih dominan dituliskan dalam buku sejarah sebatas pada agresi Militer II, Konferensi Meja Bundar (KMB), dan penyerahan kedaulatan serta RI harus membayar utang Belanda yang digunakan untuk agresi di Indonesia pada masa itu. Detail-detail kecil peristiwa yang melingkupinya tentu tidak semuanya dituliskan dalam dokumen sejarah. Untuk itulah, kajian ini mengungkap sejarah yang terlewatkan di buku sejarah yang diajarkan di sekolah. Berdasarkan catatan sejarah, terdapat peristiwa penting

yang menentukan jalan Indonesia di kemudian hari hadir di masa revolusi nasional ini. Dalam hal ini, pengkajian terhadap novel Indonesia yang turut serta menceritakan latar sejarah memberi warna pada detail-detail kecil yang tidak tercatat dalam buku sejarah.

Artikel ini membahas novel Indonesia berlatar masa perang kemerdekaan, yaitu *Burung-burung Manyar* (Mangunwijaya, 2016), *Larasati* (Toer, 2003), dan perbandingan peristiwa dalam *Cantik itu Luka* (Kurniawan, 2017) dengan *Petualang* (Trisnoyuwono, 1981). Novel *Burung-burung Manyar* mengisahkan Indonesia tiga zaman, yaitu di masa pendudukan Jepang, perang kemerdekaan, dan era 70-an. Dalam kajian ini dibatasi pada bagian dua masa perang kemerdekaan yang secara eksplisit menggambarkan sejarah masa kemerdekaan dari sudut pandang berbeda, dari perspektif prokolonial, yaitu Setadewa. Sedangkan *Larasati* karya Pram adalah novel yang mengisahkan tokoh perempuan bernama Ara yang sedang menemui ibunya di daerah pendudukan, Jakarta. Dengan ciri khas yang menarik versi Pram, ia menyoroti kebobrokan para golongan tua yang korup, sedangkan yang muda-muda berjuang mengorbankan nyawa. Novel-novel tersebut merepresentasikan peristiwa-peristiwa sekitar penyerahan kedaulatan Indonesia dalam warna yang berbeda dengan teks-teks sejarah pada umumnya. Novel-novel yang disebutkan tentu saja turut mewakili situasi dan kondisi Indonesia. Pemilihan novel yang menjadi sumber data, primer dan sekunder diupayakan untuk menemukan kesejajaran antara sastra dengan sejarah, antara fiksi dan realitas.

Karya sastra sebagai simbol verbal, objeknya adalah realitas. Realitas itu dapat berwujud realitas sosial masa kini ataupun realitas yang berupa peristiwa sejarah. Dalam hal ini, realitas sejarah yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau tidak hanya ditemukan dalam teks-teks sejarah, tetapi juga dalam karya sastra, misalnya novel-novel Indonesia berlatar perang kemerdekaan. Apabila realitas itu berupa peristiwa sejarah seperti dalam novel, hal itu mengandung maksud untuk: (1) menafsirkan realitas sejarah ke dalam bahasa imajiner dengan maksud memahami peristiwa sejarah menurut kemampuan/interpretasi pengarang sendiri, atau (2) menjadi sarana pengarang untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapannya tentang suatu peristiwa sejarah dan dapat dipakai pengarang untuk menolak atau mendukung suatu tafsiran peristiwa sejarah yang sudah mapan (Wicaksono, 2018b).

Dalam pandangan *New Historicism*, sastra dipandang telah menciptakan dirinya sejajar dengan sejarah. Dunia dan yang digambarkan dalam karya sastra bukan dunia alternatif, melainkan cara untuk mengintensifkan dunia tunggal (*single realm*) yang menekankan pada dimensi politik ideologi (Greenblatt, 2005). Keduanya, baik sastra

maupun sejarah, sama-sama mampu menghadirkan situasi faktual dari masa lalu sebagai sebuah narasi melalui imajinasi kebahasaan. Kebenaran sejarah atau sastra adalah kebenaran relatif. Sastra dan sejarah dapat diasosiasikan bergulat dalam satu bidang yang sama, yakni bahasa (Nurhadi, 2006). Oleh karena itu, kajian *New Historicism* yang digunakan mengacu pada tiga asumsi dasar, yaitu: (1) bahwa setiap tindakan ekspresif terkait erat dengan jaringan praksis budaya yang bersifat material; (2) bahwa teks-teks sastra dan teks-teks nonsastra beredar tidak terpisahkan; (3) bahwa tidak ada wacana apa pun, baik fiksi maupun faktual, yang memberi akses pada kebenaran mutlak dan tidak dapat berubah ataupun mengekspresikan hakikat kemanusiaan tanpa alternatif lain. Penafsirannya dilakukan dengan pendekatan arkeologis sebagai suatu representasi sebuah wilayah penelitian yang merujuk pada pengetahuan implisit yang khusus. Berbagai masalah tersebut dianalisis dengan pendekatan *New Historicism* Greenblatt. Dalam kajiannya, baik secara teoretis maupun praktik, Greenblatt lebih fokus pada persoalan sejarah dan sastra. Dari berbagai pandangan di atas, tulisan ini memfokuskan kajian pada tinjauan historis sekitar peristiwa penyerahan kedaulatan dalam novel Indonesia di masa perang.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teori *New Historicism*. Penelitian dilakukan dengan pembacaan paralel antara teks sastra pada peristiwa yang merupakan representasi sejarah 1949 dengan teks sejarah yang menggambarkan peristiwa yang sama. Teknik yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Penafsiran dalam kajian ini mengacu dari pendekatan arkeologis yang diungkapkan oleh Foucault. Melalui pendekatan arkeologis, Foucault (2002) mendesain penelitian yang merujuk pada pengetahuan implisit dan menghindari berbagai persoalan teori permukaan dalam hubungannya yang praktik atau sebaliknya. Berbagai praktik, teori, dan lembaga digunakan dalam media yang sama untuk kemudian mendapatkan pengetahuan dasar yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Teks sastra dan bukan sastra (sumber sejarah) ditempatkan pada wilayah penelitian yang sama. Dalam kajian *New Historicism*, teks sastra dan nonsastra dipilih melalui pilihan strategis yang didasarkan pada tema wacana yang dikembangkan (Foucault, 1972).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa penelusuran dokumen sesuai dengan fokus dan rumusan penelitian dan desain analisis isi. *Content analysis* memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang

tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik *content analysis* dalam penelitian ini: 1) mengajukan pertanyaan penelitian; 2) menentukan definisi kategori dan tingkat abstraksi untuk kategori induktif; 3) formulasi langkah demi langkah terhadap data dengan mempertimbangkan definisi kategori, mengurutkan yang ada atau kategorisasi baru; 4) revisi kategori untuk pengecekan reliabilitas formatif dengan memperhatikan pertanyaan penelitian; 5) penyelesaian akhir kategori dalam pengecekan reliabilitas sumatif; dan 6) interpretasi hasil (Mayring, 2000).

Validasi data menggunakan triangulasi sumber yaitu peristiwa dalam novel dan sejarah. Analisis dan interpretasi data dilakukan secara kontekstual yaitu sejarah perang kemerdekaan. Penjelasan atas dasar triangulasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Triangulasi data digunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda terdiri dari informan, tempat dan peristiwa serta arsip atau dokumen. Sedangkan triangulasi metodologis dilakukan dengan metode atau teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung (observasi) dan analisis dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini dipaparkan berbagai hal mengenai peristiwa di sekitar penyerahan kedaulatan RIS (Republik Indonesia Serikat) oleh Kerajaan Belanda. Peristiwa-peristiwa penting yang terekam dalam novel-novel berlatar perang kemerdekaan, yaitu 1) Agresi Militer II dan Kejatuhan Yogyakarta, 2) Perundingan Menuju Konferensi Meja Bundar, dan 3) Penyerahan Kedaulatan Indonesia.

3.1 Agresi Militer II dan Kejatuhan Yogyakarta

Situasi penyerangan Belanda atas Yogyakarta dikisahkan oleh Y.B. Mangunwijaya dalam novel *Burung-burung Manyar* dan Pramoedya Ananta Toer dalam novel *Larasati*. Dalam *Burung-burung Manyar* dikisahkan menurut sudut pandang Pak Trunya, diceritakan pada 19 Desember 1948 Pesawat perang milik Belanda terbang melintasi Magelang menuju Yogyakarta. Ketika itu melintas Larasati bersama ayahnya, Antana, dengan mengendarai mobil menuju ke ibu kota negara, Yogyakarta. Pesawat tempur milik Belanda yang melintas menembaki mobil yang ditumpangi Pak Antana dan Larasati. Mobil mereka terbakar. Pak Antana meninggal pada insiden pagi hari itu. Pak Trunya menolong Larasati dan menguburkan Pak Antana di kampungnya, di Magelang.

Sejarah Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda: Tinjauan Historis dalam Novel...

Suatu pagi dini Desember, yang tanggalnya hanya diingat para tua, 19 Desember kata mereka, di tengah wilayah damai yang serba mempersiapkan diri menyambut kedatangan musim hujan (Mangunwijaya, 2016: 128).

Tak habis-habisnya pesawat-pesawat besar itu menuju ke selatan. Ini ada apa?
“Mereka menyerang Yogya, itu sudah jelas.”

Tetapi tidak ada lagi yang kecil bermoncong merah serta Tukang Sambar (Mangunwijaya, 2016: 136).

Seperti diceritakan dalam novel *Larasati* karya Pram, kota Yogyakarta yang tidak dijaga tentara nasional dapat dikuasai dengan mudah oleh Belanda. Pada 19 Desember 1948 pukul 06.00 pagi, Belanda mulai melancarkan serangan menyerbu daerah RI. Melalui operasi lintas udara, pasukan baret hijau Belanda diterjunkan di pinggir kota Yogyakarta. Dalam waktu singkat, pangkalan udara Maguwo telah dikuasai sepenuhnya oleh tentara Belanda. Di daerah-daerah lain pasukan Belanda bergerak melintasi semua garis demarkasi dan berhasil menguasai kota-kota dan jalan raya. Aksi Polisionil Kedua (Agresi Militer II) dari 19 hingga 31 Desember 1948 merupakan kesalahan fatal (Barink, 2020). Serangan militer ini merupakan suatu tantangan terang-terangan terhadap wewenang PBB yang merugikan Belanda daripada Indonesia (Abdullah dkk., 2015). Dalam waktu singkat Belanda dapat menawan para pemimpin Republik (Kahin, 2003).

Kota-kota jatuh di tangan Belanda. Juga Yogya sendiri (Toer, 2003: 133).



Gambar 1. Agresi Militer Belanda II

(Sumber: <https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/06/agresi-militer-belanda-ii>)

Kemudian, Romo Mangun dalam *Burung-burung Manyar* menceritakan penangkapan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta menteri kabinet. Digambarkan melalui tokoh Setadewa yang merupakan bawahan Kolonel van Langen yang tidak setuju penyerangan Yogyakarta bermula dari Lapangan Terbang Maguwo (Bandara Adiscucipto) dengan berjalan kaki menuju Gedung Agung. Setadewa menginginkan tentaranya menangkap Sukarno menggunakan jip langsung menuju istana.

Jangan-jangan Soekarno lalu cukup punya waktu untuk lari ke pedalaman, malah susah ganda nanti. Aku meradiokan pandanganku itu kepada Letkol Verbruggen, supaya dia mengusulkan kepada Kolonel van Langen agar langsung saja memakai jip mendobrak istana Soekarno (Mangunwijaya, 2016: 153).

Dalam bukunya, Soetanto (2006) menjelaskan secara lengkap rencana operasi militer Belanda untuk menduduki Jawa Tengah berikut. 1) Pada hari H dilancarkan operasi lintas udara untuk merebut Lapangan Terbang Maguwo dilanjutkan dengan perebutan ibu kota RI di Yogyakarta oleh satuan tugas yang terdiri dari dua batalion infantri yang melakukan operasi pendaratan udara. Kemudian brigade penyerang yang mengangkut perlengkapan dan peralatan berat bergerak dari Salatiga ke Yogyakarta melalui jalan darat. 2) Koloni tempur Brigade V terdiri dari dua batalion, bergerak dari Salatiga ke Solo. 3) Dari Demak bergerak satu batalion merebut Cepu setelah terlebih dahulu menguasai Rembang. Dari Purwokerto bergerak satu batalion untuk merebut Wonosobo, sedangkan satu batalion lagi bergerak dari Gombang ke Yogyakarta. 4) Pada H+4, pasukan Belanda yang telah berada di Yogyakarta melakukan gerakan gabungan untuk menghancurkan konsentrasi TI di dataran tinggi Magelang.

Dalam agresi itu, fokus utama Belanda adalah merebut ibu kota RI. Rencana Belanda benar terwujud sekaligus dapat menawan pemimpin RI yang berdiam di Gedung Agung. Dalam agresi itu, fokus utama Belanda adalah menawan pemimpin RI yang berdiam di Gedung Agung. Sebelum pasukan payung militer Belanda mendarat dan menguasai Bandara Maguwo di pagi buta, Jenderal Soedirman mendatangi Sukarno. Kemudian, di hari yang sama, menurut Firdausi (2019), diadakan rapat kabinet dadakan yang memutuskan Presiden Sukarno, Wapres Hatta, dan menteri-menteri kabinet akan tetap berada di Yogyakarta. Sukarno lalu mengirim kawat kepada Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat di sana. Sementara itu, Panglima Sudirman yang juga hadir di rapat kabinet, memutuskan untuk keluar dari Yogyakarta dan memimpin gerilya.

“Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya akan meninggalkan kota ini dan masuk hutan.”

Soedirman memohon, “Bung, pergilah bersama saya.”

“Engkau seorang prajurit,” kata Sukarno dalam autobiografi *Penyambung Lidah Rakyat* yang dikutip oleh Matanasi (2016).

“Tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu. Dan tempatmu bukan pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua.”

“Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat?” tanya Soedirman.

“Jangan adakan pertempuran di jalanan dalam kota. Kita tidak mungkin menang. Tetapi pindahkanlah tentaramu ke luar kota, Dirman. Dan berjuanglah sampai mati. Aku perintahkan kepadamu untuk menyebar tentara ke desa-desa.”

Jenderal Sudirman semula berniat mengajak Bung Karno untuk menyingkir dari kota dan bergerilya bersama TKR (TNI) dan rakyat. Soekarno menolak dan memilih untuk tetap berada di Gedung Agung dengan risiko ditangkap Belanda. Bagi Soekarno, tempatnya bukan di medan perang sesungguhnya, tempatnya adalah di meja perundingan guna meraih kemerdekaan sebenar-benarnya dari tangan penjajah. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Komodor Udara Suriadarma, Mr. Ali Sastroamidjojo ditangkap oleh Belanda dan pada tanggal 22 Desember 1948 diterbangkan menuju ke Bangka untuk pengasingan. Selanjutnya, Soekarno, Sjahrir, dan Agus Salim dipisahkan dari rombongan dan diterbangkan ke Brastagi, kemudian ke Prapat, Danau Toba (Kahin, 2003).

Saat yang kunanti-nantikan terjadi. Yogya kami kuasai. Tetapi alangkah kecewanya. Dini pagi pasukan payung telah diterjunkan ke pangkalan Maguwo Yogya. Mereka mengamankan landasan dan daerah sekitarnya (Mangunwijaya, 2016: 148–149).

Yogya jatuh! Kemudian suara serdadu di atas truk bersorak-sorai menderu-deru di kupingnya. Perlahan-lahan ia bangun, kau pikir, mana mungkin Yogya bisa jatuh (Toer, 2003: 142).



Gambar 2. Pimpinan RI Ditangkap Belanda dan Diasingkan
(Sumber: <https://historia.id/histeria/articles/ketika-sukarno-marah-kepada-sjahrir-PNajj/page/1>)

Dengan ditangkap dan ditawannya pemimpin sipil, kepemimpinan politik mengalami kelumpuhan. Safruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Sumatera, setelah mendengar dari radio bahwa pemimpin-pemimpin di Yogyakarta telah ditawan, mengumumkan melalui radio suatu pemerintahan darurat atas prakarsanya sendiri. Lama setelah itu, Safruddin baru tahu bahwa pemerintah telah mengirimkan telegram yang isinya kurang lebih sama (Sapto, 2013).

Pada bulan-bulan pertama setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II, Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politik. Perdana Menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr. Supomo, salah seorang anggota Delegasi RI dalam perundingan lanjutan Renville untuk berunding. Undangan tersebut diterima oleh Indonesia dan merupakan pertemuan pertama setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II (Kuswandi, 2015).

Bahkan seluruh dunia mencela Belanda terutama India dan negara-negara bersahabat di Asia; tetapi tidak boleh dilupakan juga, Amerika Serikat. Kali ini permasalahan akan diselesaikan secara total (Mangunwijaya, 2016: 207).

Seperti digambarkan dalam novel karya Mangunwijaya, serangan yang dilakukan Belanda pada Aksi Polisional II atau sering disebut Clash II atau Agresi Militer II justru menjadi bumerang. Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia mencela serangan tersebut. Kemudian Amerika Serikat dengan PBB-nya turut campur dalam menengahi guna menyelesaikan pertikaian antara Belanda-Indonesia.

3.2 Perundingan Menuju Konferensi Meja Bundar

Dalam novel karya Pramudya dan Romo Mangun diungkap bahwa tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya ditangkap dan diasingkan ke Sumatera akan dipulangkan. Secara implisit Pram menyebutnya dengan istilah pemimpin yang ditawan di Prapat. Pemimpin yang dimaksudkan adalah Ir. Soekarno yang ditawan bersama Agus Salim dan Moh. Hatta di Parapat, Danau Toba, Sumatera Utara. Sedangkan dalam *Burung-burung Manyar*, Romo Mangun secara eksplisit menceritakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta beserta seluruh pemerintah akan dipulangkan ke Yogya. Lebih jauh lagi, Romo Mangun terinspirasi dari otobiografi yang ditulis oleh Jenderal TNI T.B. Simatupang menuliskan istilah “kurir dari Banaran” dan “staf umum TNI” yang merujuk dengan buku *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan* (1980). Staf umum TNI yang dimaksud adalah Kolonel Tahi Bonar Simatupang. Nama Banaran merujuk pada tempat markas T.B. Simatupang semasa perang gerilya, yaitu Dusun Banaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lagi pula Republik sudah bersedia kerjasama dengan Belanda. Sebentar lagi pemimpin-pemimpin, yang ditawan di Prapat akan dikembalikan ke Yogya (Toer, 2003: 169).

Seorang kurir dari Banaran, tempat Staf Umum TNI bersembunyi, membawa warta bahwa Bung Karno dan Bung Hatta beserta seluruh pemerintah akan dipulangkan ke Yogya (Mangunwijaya, 2016: 207).

Untuk menutupi kealahannya dalam perdebatan internasional, pihak Belanda mengadakan kontra usul sebagai usaha untuk melepaskan diri dari pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan. Pemerintah Belanda mengirimkan undangan kepada Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menghadiri KMB yang diselenggarakan tanggal 12 Maret 1949 di Belanda. Maksud konferensi tersebut untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia secepat-cepatnya kepada pemerintah federal yang dianggap mewakili Indonesia. Dalam KMB tersebut dibahas Uni-Indonesia Belanda dan peraturan peralihan sampai saat penyerahan. Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa diminta memberikan jasa baiknya untuk pelaksanaan cita-cita tersebut. Untuk memenuhi Resolusi Dewan Keamanan, para pemimpin yang ditawan akan dibebaskan. Bersamaan itu, pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai wakil tinggi Mahkota Belanda untuk menemui Bung Karno bersama para pembesar lainnya yang sedang ditawan. Dr. Koets pergi ke Bangka pada tanggal 28 Februari 1949 kedatangannya untuk menjelaskan maksud pemerintah Belanda mengundang Bung Karno untuk menghadiri KMB di Den Haag. Isi penjelasan yang disampaikan kepada Bung Karno, menurut penjelasan Nugroho Notosusanto (1985: 36) sebagai berikut. 1) Pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag guna membahas "Penyerahan" kedaulatan dipercepat. 2) Penarikan pasukan-pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah "Penyerahan" kedaulatan. 3) Tentang pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta, dinyatakan bahwa hal itu mungkin dilaksanakan.

Pada tanggal 3 Maret 1949 Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO dan menegaskan tentang perlunya kedudukan Pemerintah RI dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan yang selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Maret 1949, Presiden Sukarno membalas undangan Wakil Tinggi Mahkota Belanda yang berisi penolakan menghadiri KMB. Jawaban Presiden tersebut mendorong pemerintah Belanda menunda pelaksanaan KMB, serta meninjau kembali penolakan kembalinya Pemerintah Republik di Yogyakarta. Dengan pendekatan politis antara pihak Republik Indonesia dan Belanda, pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia diadakan perundingan antara RI-Belanda. Perundingan tersebut dilakukan di Hotel Des Indes Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran. Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sebagai ketua Mr. Ali Sastroamidjoyo sebagai wakil ketua, dan anggotanya ialah Dr. Leimena, In Juanda, Prof. Mr. Supomo, Mr. Latuhaihary disertai 5 penasihat. Dari delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. T. H. Van Royen dengan anggota-anggotanya; Mr. U. S. Blom, Mr. A. S. Jacob, Dr. J. J. Van der Velde, dan empat orang penasihat (Kuswandi, 2015).

Setelah tercapai kesepakatan antara Belanda-Indonesia, terjadilah persetujuan yang dikenal dengan nama *Roem-Roijen Statement*. Nama tersebut tepat karena hasil perundingan bukan ditandatangani kedua belah pihak, tetapi secara lisan oleh ketua delegasi masing-masing. Adapun isi Persetujuan Roem-Royen dibacakan secara formal oleh Komisi PBB pada tanggal 7 Mei 1949. 1) Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyatakan kesanggupan untuk menghentikan perang gerilya. 2) Belanda dan Indonesia bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3) Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dengan tidak bersyarat. 4) Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah pengawasan PBB. 5) Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus bebas dan leluasa melaksanakan jabatan sepenuhnya dalam satu daerah, meliputi Yogyakarta. 6) Pemerintah Belanda menyetujui adanya RI sebagai suatu negara. 7) Pemerintah Belanda membebaskan dengan tidak bersyarat pemimpin RI dan tahanan politik yang ditangkap sejak 19 Desember 1948. 8) KMB segera diadakan setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta (Agung, 1994).

Lagi pula Republik sudah bersedia kerja sama dengan Belanda. Sebentar lagi pemimpin-pemimpin, yang ditawan di Prapat akan dikembalikan ke Yogya (Toer, 2003: 169).

“Mengapa tidak dimasukan penjara saja?”

“Suatu gupermen yang kalah tidak berhak lagi memenjara.”

“Menurut anggapanmu kita sudah kalah?” (Mangunwijaya, 2016: 195).

Kutipan dari novel *Burung-burung Manyar* karya Y.B. Mangunwijaya dan *Larasati* karya Pramoedya Ananta Toer memperkuat fakta bahwa dari hasil kesepakatan Roem-Royen, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda sejak Agresi Militer II dipulangkan ke Yogyakarta. Para tahanan politik juga turut dibebaskan. Begitu pula warga masyarakat yang sebelumnya mengungsi lebih jauh ke pedalaman, kembali ke daerah asal, khususnya Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil Persetujuan Roem-Royen, Presiden Soekarno memerintahkan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dengan penetapan presiden yang segera dijawab oleh HB IX untuk mengorganisasi pemerintahan Republik Indonesia serta polisi negara dibangun kembali dalam waktu 24 jam. Kemudian HB IX mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak kepada TNI dan menarik pasukan Belanda yang dilakukan pada 29 Juni 1949. Selanjutnya, Hamengku Buwono IX a.n. Presiden RI mengeluarkan selebaran dan berpidato melalui RRI bahwa pada 30 Juni 1949 kekuasaan pemerintahan di Yogyakarta telah dikembalikan. Untuk sementara waktu,

pemerintahan sipil dan militer dipegang oleh HB IX selaku Menteri Negara Koordinator Keamanan. Kemudian, pada 6 Juli 1949, rombongan Presiden dan Wakil, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pendidikan Ali Sastroamijoyo, M. Roem, dan Suryadarma tiba di Lapangan terbang Maguwo (Kurniasari, 2006). Akibat perang kemerdekaan II yang terjadi sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda II berpengaruh terhadap situasi politik maupun keamanan yang berlangsung di Indonesia. Selain itu, aksi militer Belanda II mendapat reaksi dari luar negeri Indonesia. Turut campurnya Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda tersebut, membuktikan bahwa persoalan Indonesia-Belanda menjadi persoalan dunia. Hal tersebut sesuai dengan temuan dalam novel *Burung-burung Manyar* karya Y.B. Mangunwijaya dan *Larasai* karya Pramoedya Ananta Toer berikut.

Perundingan-perundingan di negeri Belanda tidak menimbulkan sesuatu perasaan agung di dalam hati mereka. Konferensi Meja Bundar! (Toer, 2003: 173).

Indonesia akan diakui oleh dunia internasional dan akan segera diadakan Konferensi Meja Bundar (Mangunwijaya, 2016: 207).

Menurut Ide Anak Agung Gde Agung (1973), PBB menyarankan diadakannya perundingan agar kedua belah pihak mendapatkan penyelesaian. Sebelumnya, sebagai akibat Agresi Militer Belanda II dan sebagai pembuktian bahwa Indonesia masih ada, dilancarkan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipelopori oleh para pejuang RI dengan Sultan Hamengkubuwana IX sebagai inisiatornya. Tanggal 4 April 1949, digelar Perundingan Roem-Royen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya persetujuan diadakannya KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, dan penerapan gencatan senjata. Setelah itu, perundingan antara pihak RI dan BFO dilakukan. Pertemuan ini disebut sebagai Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada 19–22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli–3 Agustus di Jakarta. BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal adalah sebuah komite yang terdiri atas 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Menurut Marwati dan Nugroho dalam *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (1993), perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara. Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah bentuk baru. Lalu, diadakannya Panitia Persiapan Nasional (PPN) sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS (Prinada, 2021).

Beberapa perundingan berhasil diselenggarakan, seperti halnya perundingan Roem-Royen, Konferensi inter-Indonesia, dan akhirnya terlaksana KMB. Delegasi dari tiap-tiap negara telah bersiap-siap untuk pergi ke Den Haag. Untuk Delegasi Indonesia telah tersusun dengan baik pada tanggal 4 Agustus 1949. Delegasi Indonesia terdiri atas Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr Mr. Supomo, Dr. Leimena, Mr. Ali Sostroamijoyo, Ir. Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Dr. Sumitro, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel Simatupang, dan Mr. Sumardi.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Dalam KMB, Belanda mempertahankan dengan keras mengenai Irian Barat. Di Indonesia terutama bagian timur timbul berbagai reaksi dari masyarakat yang menuntut agar Irian Barat tidak dipisahkan dari wilayah Indonesia lainnya. Dalam Parlemen NIT telah diterima mosi dengan suara bulat pada tanggal 26 Oktober 1949 yang menuntut agar Irian Barat tetap berada dalam wilayah RIS.

KMB berlangsung mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Rumusan hasil atau isi KMB adalah sebagai berikut. 1) Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2) RIS menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya: rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. 3) Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Yuda Prinada (2021) meringkas hasil KMB menjadi tiga poin berikut. 1) Penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS akan dilakukan pada 27 Desember 1949. 2) APRIS (Angkatan Perang RIS) disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya yang dimiliki RIS. 3) Kekuasaan terkait daerah Irian Barat akan diperbincangkan lagi satu tahun setelah KMB. Kedua poin pertama pada dasarnya berhasil didapatkan oleh RIS. Namun, terkait poin ketiga yakni soal status Irian Barat (Irian Jaya atau Papua) ternyata belum dapat diselesaikan dalam waktu ditentukan dalam KMB. Urusan Irian Barat baru dapat dituntaskan pada 1963 melalui mediasi United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) bentukan PBB. Tindakan-lanjutnya adalah dilaksanakannya *Act of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua selama 6 pekan dari Juli hingga Agustus 1969 yang menghasilkan integrasi wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.3 Penyerahan Kedaulatan Indonesia

Secara mendalam, Y.B. Mangun Wijaya melalui novel *Burung-burung Manyar* menceritakan secara gamblang prosesi penyerahan kedaulatan kepada RI oleh Kerajaan Belanda.

...konferensi ini hanya beracara tunggal: penyerahan kedaulatan kepada RI (Mangunwijaya, 2016: 207).

Dikutip dari buku *Pernyataan Roem-Van Roijen* tulisan Ida Anak Agung Gde Agung (1994; dikutip oleh Parinduri, 2021), Indonesia berharap perundingan yang akan dilanjutkan dengan KMB dapat menghasilkan kemenangan yang telah lama dicita-citakan. KMB pun dimulai pada 23 Agustus 1949 di Gedung Ridderzal, Den Haag.



Gambar 3. Penyerahan kedaulatan Belanda ke Republik Indonesia Serikat (RIS), dihadiri Ratu Belanda Juliana dan Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta
(Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4838070/ratu-belanda-teken-penyerahan-kedaulatan-indonesia-harus-bayar-mahar>)

Pada 1 November 1949 dihasilkan kesepakatan yang berisi 3 poin, yaitu Piagam penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia Peraturan dasar Uni Indonesia-Belanda Lampiran status Uni Indonesia-Belanda Tanggal 21 Desember 1949, Presiden Sukarno membentuk dua delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan dan satu delegasi menerima penggabungan RI ke Republik Indonesia Serikat (RIS). Mohammad Hatta ditunjuk sebagai delegasi untuk menerima penyerahan kedaulatan di Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai delegasi menerima penyerahan kedaulatan di Jakarta, dan Dr. Abu Hanifah sebagai delegasi menerima penggabungan RI ke RIS. Akhirnya kedaulatan

Indonesia diakui oleh Belanda pada 27 Desember 1949 di Istana, Dam, Amsterdam. Dalam penyerahan kedaulatan ini dilakukan penandatanganan 3 dokumen yang telah disepakati pada 1 November 1949. Dengan penandatanganan tersebut, secara resmi Indonesia telah diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh serta menjadi bagian dari tatanan dunia internasional.

Berdasarkan kutipan dari novel *Burung-burung Manyar* dan *Larasati*, dikemukakan situasi Indonesia pada saat penyerahan dan pascapenyerahan kedaulatan RIS oleh Belanda, yaitu kembalinya ibu kota RI di Jakarta. Dengan itu pula, Presiden Soekarno kembali dan menyampaikan orasi di hadapan warga Jakarta yang memenuhi Lapangan Merdeka Utara (kini Monas).

Orang-orang berduyun-duyun membanjiri Merdeka Utara, menyambut Presiden Soekarno dari Yogyakarta, menggantikan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai Presiden Sementara Negara Republik Indonesia Serikat? Orang tidak peduli Serikat atau Kesatuan. Pokoknya penjajahan Belanda telah diakhiri (Toer, 2003: 174).

Sikap terhadap KMB dalam novel ini tampak sama dengan novel *Petualang* karya Trisnoyuwono (1981), diterbitkan Sinar Harapan. Sementara *Larasati* karena hambatan politik baru terbit sebagai buku tahun 2000 oleh Hasta Mitra. Sikap pengarang dalam novel *Petualang* terhadap KMB diringkas dengan umpatan, “Persetan penyerahan kedaulatan!!” Tokoh utama novel *Petualang* ketika KMB itu ternyata tidak menjamin masa depan dan keselamatan hidupnya. Ia pun lari dari tahanan Belanda. Dengan latar politik “Revolusi Belum Selesai” itulah tendensi politik Pramoedya Ananta Toer terhadap arah republik yang sudah diperjuangkan kurang lebih 15 tahun (1945–1960) itu tampak menonjol dan semakin berpihak dalam novel *Larasati* ini.

Serupa dengan kutipan novel *Larasati* karya Pramoedya Ananta Toer, Eka Kurniawan dalam *Cantik itu Luka* juga menyoroti kerelaan hasil KMB dan pengakuan Kerajaan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Dalam pemberitaan di *Tribunnews* (Tumanggor, 2020), dipaparkan kesepakatan mengenai siapa yang harus menanggung utang Hindia Belanda menjadi perdebatan yang sulit menemui titik temu dalam KMB. Hal ini mengingat utang pemerintah Belanda yang ditinggalkan di Hindia Belanda sangat besar. Membengkaknya hutang Hindia Belanda karena banyak biaya yang harus dikeluarkan Belanda untuk melakukan dua agresi militer. Pihak delegasi Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan catatan, Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga penyerahan kedaulatan.

.. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia di meja perundingan. Itu terasa menyebalkan baginya: republik ini telah merdeka empat tahun lalu, tapi Belanda baru mengakuinya sekarang, dan pemerintahan sipil menerimanya begitu saja, asalkan mereka pergi (Kurniawan, 2017: 156).

Belanda menetapkan harga yang tinggi untuk mahar sebuah kedaulatan. Kedaulatan yang sebenarnya tidak penuh untuk Indonesia karena mengecualikan Papua bagian barat. Belanda meminta Indonesia membayar 6,5 miliar Gulden. Biaya sebesar itu digunakan Belanda untuk membayar aksi polisionil Belanda terhadap Indonesia. Aksi polisionil adalah istilah mereka untuk menyebut Agresi Militer Belanda. Aksi tersebut membuat Indonesia menderita. Utusan Komite PBB untuk Indonesia (UNCI), Merle Cochran (dalam Damarjati, 2019) menilai 6,5 miliar Gulden terlalu tinggi untuk dibayar sebuah negara yang baru merdeka seperti Indonesia. UNCI menawar agar Belanda menurunkannya, Belanda akhirnya menurunkannya menjadi 4,5 miliar Gulden. Utang warisan Hindia Belanda tersebut merupakan salah satu harga mahal yang harus dibayar pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari bekas negara penjajah.

Sehari setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Soekarno kembali ke Jakarta setelah empat tahun mengungsi ke Yogyakarta. Dengan menumpang pesawat Dakota milik Garuda Indonesia Airways, Soekarno tiba di Lapangan Udara Kemayoran pada 28 Desember 1949. Di Istana Negara, ribuan orang berkumpul untuk mendengarkan pidato Presiden RIS, Ir. Soekarno.

4. Simpulan

Seperti yang telah diungkap sebelumnya bahwa fiksi berpotensi sebagai sumber data sejarah. Hal itu tampak pada karya Pramoedya Ananta Toer yang menawarkan sejarah yang dituangkan dalam fiksi. Sejarah dalam novel *Larasati* karya Pramoedya bertabrakan dengan sejarah resmi yang dikreasi negara dan penguasa pada zamannya. Ia muncul dan menggagas sejarah dengan versi yang beragam, seperti versi dirinya sendiri, versi penjajah, kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru. Itu semua dipenuhi intrik politik yang melingkupinya. Dalam kajian ini dikemukakan praktik kuasa dan kekerasan oleh penjajah Belanda kepada bangsa Indonesia yang menginginkan kedaulatan sepenuhnya. Y.B. Mangunwijaya menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa dalam pandangan Sutan Sjahrir, kekerasan Belanda seolah membangun jebakan bagi dirinya sendiri. Setiap serangan dan agresi militer yang dilakukan adalah kesalahan yang memojokkan pihak Belanda. Hal itu benar adanya, harus diakui bahwa kemerdekaan Indonesia diakui Belanda setelah dilakukannya penyerahan kedaulatan penuh atas Indonesia oleh Ratu Belanda.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T., Zuhdi, S., & PaEni, M. (2015). *Pengayaan Materi Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Agung, I. A. A. G. (1973). *Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965*. Mouton: The Hague, Mouton.
- Agung, I. A. A. G. (1994). *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Barink, R. (2020). *Caught between the Netherlands and the Republic: the position of the Federal Consultative Assembly – ‘Bij eenkomst voor Federaal Overleg’ (BFO)– during the Dutch-Indonesian conflict, 1945–1950*. Leiden: Leiden University. <https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/123245>.
- Damarjati, D. (2019). *Ratu Belanda Teken Penyerahan Kedaulatan, Indonesia Harus Bayar Mahar*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4838070/ratu-belanda-teken-penyerahan-kedaulatan-indonesia-harus-bayar-mahar/2>.
- Firdausi, F. A. (2019). Sejarah Gencatan Senjata RI-Belanda: Awal Mula Pengakuan Kedaulatan. *Tirto*. <https://tirto.id/sejarah-gencatan-senjata-ri-belanda-awal-mula-pengakuan-kedaulatan-efnx>.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. London-New York: Phantoon Books.
- Foucault, M. (2002). *Pengetahuan dan Metode: Karya Penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Greenblatt, S. (2005). *The Greenblatt reader* (M. Payne (ed.)). MPG Books Ltd.
- Kahin, G. M. (2003). Nationalism and Revolution in Indonesia. In *Cornell University Southeast Asia Program Publications*. Cornell University Southeast Asia Program Publications. <https://doi.org/10.1017/s0165115300022063>.
- Khakim, N. L. (2016). Refleksi Sumber Pembelajaran Sejarah. *Sejarah Budaya*, 94–100.
- Kurniasari, T. A. (2006). *Seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948* [Universitas Sanata Dharma]. https://repository.usd.ac.id/25104/2/011314004_Full%5B1%5D.pdf.
- Kurniawan, E. (2017). *Cantik Itu Luka*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuswandi, H. (2015). Pengaruh Perang Kemerdekaan II terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 December 1949. *Jurnal Artefak*, 3(2), 1–27.
- Mangunwijaya, Y. B. (2016). *Burung-burung Banyak*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. *Forum: Qualitative Social Research*, 1(2). <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2385>.

- Notosusanto, N. (1985). *Ikhtisar Sejarah RI (1945–Sekarang)*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kepolisian Pusat Sejarah ABRI.
- Nurhadi. (2006). Peran diskursif karya sastra dan media. *Diksi, Januari*(44), 1–11. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132236129/penelitian/PERAN+DISKURSIF+KARYA+SASTRA+DAN+MEDIA.pdf>.
- Parinduri, A. (2021). *Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda*. Tirto.Id. <https://tirto.id/sejarah-pengakuan-kedaulatan-indonesia-oleh-belanda-gaat>.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Volume 2). Jakarta: Balai Pustaka.
- Prinada, Y. (2021). *Sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB): Latar Belakang, Tokoh, Hasil*. Tirto.Id. <https://tirto.id/sejarah-konferensi-meja-bundar-kmb-latar-belakang-tokoh-hasil-f97A>.
- Sapto, A. (2013). Perang, Militer dan Masyarakat: Pemerintahan Militer pada Masa Revolusi dan Pengaruhnya pada Indonesia Kini. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 18–33. <http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4734>.
- Simatupang, T. B. (1980). *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soetanto, H. (2006). *Yogyakarta 19 Desember 1948: Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No. 1)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Toer, P. A. (2003). *Larasati*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Trisnoyuwono. (1981). *Petualang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tumanggor, A. (2020). Inilah Total Utang Belanda yang Harus Ditanggung Indonesia untuk Pengakuan Kedaulatan Kemerdekaan RI. *Tribun News*. <https://medan.tribunnews.com/2020/10/31/inilah-total-utang-belanda-yang-harus-ditanggung-indonesia-untuk-pengakuan-kedaulatan-kemerdekaan-ri?page=2>.
- Wellek, R. & Warren, A. (2016). *Teori Kesusastraan (Terjemahan Melanie Budianta)*. Gramedia.
- Wicaksono, A. (2018a). Makna Perjuangan dalam Novel Indonesia Berlatar Perang Kemerdekaan (Tinjauan New Historicism Greenblatt). *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 18(2), 210–220. <https://doi.org/10.17509/bs>.
- Wicaksono, A. (2018b). Sejarah Politik Indonesia dalam Novel *Larasati* Karya Pramoedya Ananta Toer. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 7(1), 20–35.